



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Badan Pendapatan Daerah**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **85.9** dengan predikat **"A"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Memuaskan"**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	28.5
b. Pengukuran Kinerja	30	27.2
c. Pelaporan Kinerja	15	9.7
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>85.9</b>
<b>Predikat AKIP</b>		<b>A</b>

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah. Tahun 2024 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

Perkin: - Nama Pak Kaban masih typo - Untuk level Kabid, gunakan sasaran kegiatan - Kasubid Pendataan (Dadan, S.Sos) belum tandatangan) - Target 90% jangan asal tempel, tapi perhatikan juga cara menghitungnya (perhatikan juga di cascadingnya) - Di kasubag umum apakah betul target SPM menjadi SP2D 90%? - Di staf, bahasanya harus output dan indikator belum memenuhi kriteria SMART, jangan ke meningkatnya. Diperbaiki yang staf, tapi yang diupload cukup sampai eselon IV/setara

### 2.) Pengukuran Kinerja

Realisasi Tahun 2023 jauh dari target yang diharapkan

### 3.) Pelaporan Kinerja

1. Analisa faktor-faktor kegagalan/keberhasilan belum mendalam dan komprehensif

#### 4.) Evaluasi Internal

1. Terdapat sebagian kecil belanja yang tidak relevan dengan pencapaian kinerja.

### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Mohon diperbaiki sesuai catatan

#### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Mohon penjelasan

#### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Agar melakukan analisa faktor-faktor penyebab kegagalan/ keberhasilan secara mendalam dan komprehensif

#### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Evaluasi Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Badan Pendapatan Daerah. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Badan Pendapatan Daerah. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka